

## **P E N D A H U L U A N**

### **L a t a r B e l a k a n g**

Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Jumlah penduduk yang besar ini akan dapat menjadi aset pembangunan yang potensial, apabila dibina secara intensif dan efektif. Secara umum telah diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di pedesaan berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Hal ini disebabkan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan, keterampilan yang dikuasai, dan terutama modal yang dimiliki.

Untuk mendayagunakan potensi tersebut, dibutuhkan adanya kerjasama, sinergi, serta keterkaitan antar seluruh komponen aras masyarakat, mulai dari masyarakat, para tokoh masyarakat, praktisi pendidikan, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Bentuk dari sinergi yang telah disebutkan itu, akan lebih baik jika berbentuk sebuah lembaga khusus. Sebuah lembaga yang mempersatukan beragam kompetensi dari berbagai macam potensi komponen masyarakat. Potensi ini diambil dari pihak masyarakat desa, praktisi pendidikan, pemerintah daerah, serta pihak swasta (perusahaan).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengamatan, penulis belum menemukan suatu lembaga yang dibentuk atas kerjasama perguruan tinggi, pemerintah desa, dan perusahaan swasta secara bersama-sama. Selain pembentukan lembaga akomodatif tersebut, diperlukan pula tindakan-tindakan antisipatif terhadap tantangan yang akan menghadang keberlangsungan agar terus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan yang ada di lapangan bahwa biasanya suatu lembaga atau program yang bertugas untuk memberdayakan masyarakat itu bertahan hanya sekitar lima tahun saja. Setelah itu lembaga atau program tersebut hilang bahkan tanpa sepengetahuan masyarakat.

### **U r a i a n S i n g k a t**

Karya tulis ini berkenaan dengan gagasan dan pendapat-pendapat mengenai program pengentasan kemiskinan yaitu berupa pembentukan suatu lembaga pendamping usaha yang diprakasai oleh praktisi pendidikan, pemerintah daerah, serta pihak swasta. Aspek yang akan dibahas meliputi mekanisme kinerja lembaga tersebut, termasuk juga rencana kelanjutan dan tindakan antisipasi terhadap tantangan.

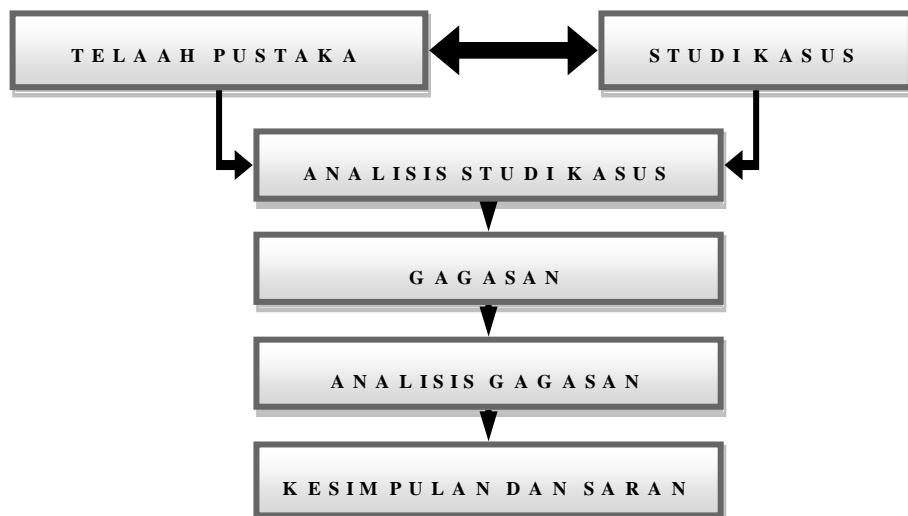
### **T u j u a n d a n M a n f a a t**

Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan gagasan solusi alternatif berupa lembaga penyempurna yang berjalan secara berkelanjutan, untuk bersama-

sama membangun masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis ini adalah memberikan inspirasi untuk membangun dan memupuk kepercayaan pemerintah dan masyarakat umum atas potensi dari masyarakat pedesaan, serta menciptakan solusi yang lebih baik, efektif, dan efisien.

#### **M E T O D E P E N U L I S A N**



**G a m b a r 1. Diagram alir tahap penulisan.**

Tahap penulisan dalam karya tulis ini berawal dari teori dan gagasan yang ada, hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran. Berdasarkan teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, maka dapat dilakukan analisis gagasan mengenai penyempurnaan kelembagaan sebagai solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Sehingga, dapat diperoleh solusi yang pada akhirnya dapat diamalkan mengenai penyempurnaan kelembagaan.

#### **TELAAH PUSTAKA**

#### **Peran Desa Dalam Pembangunan**

Pembangunan adalah usaha untuk membentuk, membangun, merubah, serta mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Apabila diamati dari ruang lingkup

wilayah berlakunya, pembangunan dapat dibedakan atas pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan pembangunan desa (Oka, 1991).

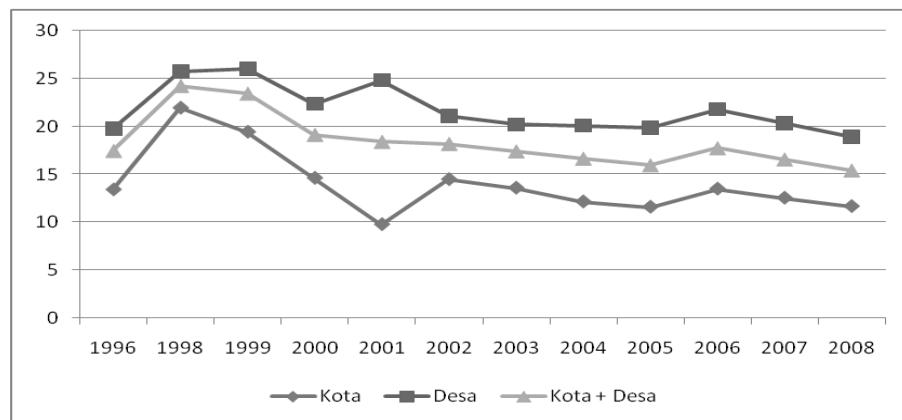
Sebesar 80% penduduk di Indonesia menetap di pedesaan yang penghidupan pokoknya bersumber dari kegiatan pertanian (tani tanaman, ternak, dan tani ikan). Jumlah penduduk yang demikian besar memiliki potensi untuk mendominasi hasil dari pertumbuhan dan pembangunan nasional. Pembangunan yang paling dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat desa tersebut adalah pembangunan ekonomi.

Sangat disayangkan ketika melihat Berita Resmi Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa persentase terbesar masyarakat miskin berada di daerah desa. Berikut adalah tabel data serta grafiknya:

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia  
Menurut Daerah, 1996-2008**

Tahun [1]	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota [2]	Desa [3]	Kota + Desa [4]	Kota [5]	Desa [6]	Kota + Desa [7]
1996	9.42	24.59	34.01	13.39	19.78	17.47
1998	17.6	31.9	49.5	21.92	25.72	24.23
1999	15.64	32.33	47.97	19.41	26.03	23.43
2000	12.3	26.4	38.7	14.6	22.38	19.14
2001	8.6	29.3	37.9	9.76	24.84	18.41
2002	13.3	25.1	38.4	14.46	21.1	18.2
2003	12.2	25.1	37.3	13.57	20.23	17.42
2004	11.4	24.8	36.1	12.13	20.11	16.66
2005	12.4	22.7	35.1	11.58	19.88	15.97
2006	14.49	24.81	39.3	13.47	21.81	17.75
2007	13.56	23.61	37.17	12.52	20.37	16.58
2008	12.77	22.19	34.96	11.65	18.93	15.42

Sum ber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



**G a m b a r 2 . P e r s e n t a g e k e m i s k i n a n d i p e r k o t a a n , p e r d e s a a n , d a n  
p e r k o t a a n + p e r d e s a a n m e n u r u t t a h u n .**

Dewasa ini, para pakar ilmu ekonomi pembangunan mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen

unggulan yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2003).

Johnston dan Clark (1982) mengungkapkan tiga tombak pembangunan ekonomi pedesaan yang sekaligus harus digunakan. Ketiga tombak tersebut adalah: (1) peningkatan produksi dan kesempatan kerja di sektor pertanian dan luar pertanian di pedesaan. Perluasan kesempatan kerja produktif mencakup usaha rumah tangga, usaha tani keluarga, dan industri padat tenaga kerja pedesaan, (2) program perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan gizi, serta keluarga berencana; dan (3) penyempurnaan kelembagaan pelayanan, perbaikan pengolahan, dan kemampuan tenaga pimpinan pembangunan pedesaan. Ketiga tombak tersebut menekankan pula pada partisipasi aktif masyarakat pedesaan. Atau dengan kata lain, peningkatan di bidang produksi, konsumsi, dan penyempurnaan organisasi atau kelembagaan (Kasryno, 1984).

#### **Penyempurnaan Kelembagaan**

Kelembagaan dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut menentukan tata cara kerja sama dan koordinasi anggota masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya serta membantu mereka dalam menentukan hak serta kewajiban masing-masing (Hayami dan Kikuchi, 1982).

Kelembagaan pedesaan dapat berupa kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja, dan kelembagaan perkreditan. Dengan kurang berkembangnya ekonomi pasar pedesaan, maka hubungan kelembagaan ini memegang peranan penting dalam transaksi, baik untuk faktor produksi maupun untuk produknya (Kasryno, 1984).

Berdasarkan tombak ketiga dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dibutuhkan penyempurnaan kelembagaan pelayanan, perbaikan pengolahan, dan kemampuan tenaga pimpinan pembangunan pedesaan. Hal ini tentu akan lebih sempurna jika lembaga yang dimaksud tersusun atas pihak-pihak yang berkompeten.

Pihak-pihak yang diharapkan menjadi komposisi dari lembaga penyempurnaan ini adalah institusi pendidikan yang diwakili oleh perguruan tinggi, pemerintah desa, serta pihak swasta atau perusahaan. Ketiga komposisi tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan pembangunan nasional.

#### **Peran Perguruan Tinggi**

Ravik Karsidi dari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Sebelas Maret pada Diskusi Kesiapan Kampus Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Fakultas Hukum UNS, Solo, 19 Mei 2001 menyampaikan bahwa dalam rangka aktualisasi peran Perguruan Tinggi (khususnya dharmapengabdian kepada masyarakat), maka peranan makro yang dapat dimainkan antara lain:

1. Perguruan Tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial.
2. Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan masyarakat yang ada. Tidaklah berlebihan sekiranya perguruan tinggi diharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan Perguruan Tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan Perguruan Tinggi.
3. Perguruan tinggi dituntut untuk menentukan dan memilih kebijakan yang benar-benar strategis bagi perubahan-perubahan masyarakat yang lebih baik dan bagi penyelesaian masalah-masalah mendasar bangsa saat ini, baik ditingkat nasional maupun lokal.

#### **Peran Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah unit organisasi pemerintah terendah yang berada langsung di bawah Camat. Pemerintah desa memiliki peran penting, mulai penyampaian informasi hingga menjadi ujung tombak dalam upaya menyuksekan program-program pemerintah dalam pembangunan.

Pemerintah desa, khususnya Kepala Desa, dapat dikatakan sebagai ujung tombak karena hal ini berkaitan dengan peran mereka sebagai pemimpin pendapat (*opinion leader*) dan merupakan "*primus inter pares*" di desanya. Bagi masyarakat desa, Kepala Desa bukan hanya sebagai Kepala Pemerintahan Desa, namun sekaligus sebagai pengayom bagi seluruh warga desa yang dipimpinnya.

Apabila dilihat dari perilaku masyarakat yang seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya pembangunan di pedesaan sangat ditentukan oleh fungsi dan peranan para pemimpin desa, khususnya Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa.

#### **Peran Pihak Swasta**

Pihak swasta yang diharapkan menjadi bagian dari lembaga penyempurnaan di sini adalah badan-badan usaha yang telah mampu melakukan pengembangan usaha dengan profesional. Badan usaha atau perusahaan yang akan menjadi pelengkap dalam program ini akan berperan sebagai donatur dan pelatih dalam bidang manajerial serta strategi pengembangan usaha.

Sehingga diharapkan masyarakat desa akan lebih memiliki wawasan keprofesionalan yang hampir setara dengan sistem manajerial perusahaan. Namun perlu ditekankan bahwa, di dalam program ini, perusahaan tidak berhak menuntut adanya pengembalian berupa laba (*profit*). Maka dari itu, hendaknya perusahaan

memasukkan program ini menjadi salah satu agenda Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut.

## G A G A S A N

### Studi Kasus

Berikut ini adalah contoh program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2010, kepada saudara Abdul Rohman, seorang warga Desa Bologarang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sekitar tahun 1996, pemerintah Desa Bologarang melakukan suatu program pemberdayaan masyarakat bernama Bankpres. Program Bankpres ini adalah program peminjaman sapi sebagai modal usaha. Program ini berawal dari inisiatif pemerintah dalam menghadapi krisis moneter dan menambah penghasilan warga desa selain bertani.

Pemerintah desa kala itu melihat kebiasaan warganya yang ketika sepulang dari bertani selalu pulang membawa rerumputan. Rerumputan ini digunakan sebagai pakan hewan ternak warga. Bagi warga desa Bologarang adalah hal yang tabu apabila seseorang warga tidak membawa rumput ketika pulang dari sawah.

Mekanisme program Bankpres ini berawal dari peminjaman 250 ekor induk sapi kepada 250 kepala keluarga. Ketika proses penyerahan sapi kepada warga, di sana hadir pula pedagang yang bertugas untuk menaksir harga awal sapi yang akan diserahkan. Taksiran harga itu berguna sebagai patokan awal atas perkembangan sapi tersebut.

Dengan adanya patokan awal harga sapi itu, warga yang menerima pinjaman sapi berkewajiban untuk merawat sapi sebaik mungkin agar ketika pengembalian induk sapi nanti, harga sapi tidak jatuh dibawah harga awal.

Setelah dirawat dan dikawinkan sedemikian rupa, maka akan lahir anak sapi dari induk pinjaman. Rata-rata, sapi akan beranak satu ekor anak sapi dalam satu tahun. Induk sapi akan diambil oleh pemerintah daerah ketika anak sapi berumur kira-kira sebelas hingga satu tahun. Pemerintah desa mengirimkan utusannya dan pedagang sapi untuk melihat kondisi dan menaksir harga anak sapi (sebagai nilai bantuan dari pemerintah daerah kepada warga tersebut) serta proses pengembalian induk sapi.

Ketika pemeriksaan, pedagang sapi menaksir harga induk sapi yang telah dirawat tersebut. Apabila harga induk sapi melebihi harga taksiran awal, maka selisih dari harga itu akan dibagi rata antara pemerintah dan warga perawat sapi. Selain itu, warga perawat juga dibebani biaya sebesar Rp 150.000,- sebagai biaya administrasi dan secara otomatis, biaya administrasi tersebut akan terasa ringan bagi warga perawat apabila induk sapi mengalami peningkatan harga. Pembagian hasil usaha perawatan induk sapi serta pembayaran biaya administrasi per anak

sapi yang dilahirkan ini, sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak ketika penyerahan sapi.

Program ini terbilang sukses di desa yang memiliki penduduk berjumlah 2.604 jiwa tersebut, karena setelah periode awal pelepasan 250 ekor induk sapi, terdapat pertambahan sekitar 200 kepala keluarga yang mengikuti program ini di periode berikutnya. Akan tetapi sangat disayangkan program ini hanya berjalan sekitar lima tahun saja. Setelah itu tidak ada kelanjutan untuk pendampingan perawatan maupun pengolahan hasil ternak warga.

#### **Harapan Warga Desa Bologarang**

Berdasarkan hasil wawancara, sesungguhnya warga desa Bologarang sangat mengharapkan adanya program peminjaman modal berupa modal riil yang menghasilkan. Warga desa sendiri pun berpendapat bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan. BLT yang diterima warga lebih cepat habis untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendampingan dalam mengolah bantuan dana tersebut untuk kegiatan yang lebih produktif.

Selain itu warga desa Bologarang belum pernah mendapatkan penyuluhan apalagi pendampingan dalam kegiatan wirausaha. Jika ada pihak perguruan tinggi atau pemerintah daerah yang datang untuk penyuluhan, tema penyuluhan selalu berkaitan dengan pendidikan-pendidikan dasar. Belum ada sama sekali penyuluhan yang berkaitan dengan pencerdasan dan pembangunan ekonomi. Warga desa Bologarang mengaku sangat membutuhkan adanya pendampingan dalam pembuatan dan pengembangan usaha terutama yang berkaitan dengan hasil tani dan produk olahan sapi.

#### **Lembaga Pendamping Usaha (LPU) Sebagai Lembaga Penyempurna**

Lembaga Pendamping Usaha adalah lembaga yang dibentuk oleh perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pihak swasta (perusahaan) untuk bersama-sama membimbing masyarakat desa untuk berwirausaha. Target program pembimbingan dan pendampingan usaha ini ditujukan khusus untuk masyarakat desa saja. Dalam gagasan ini akan difokuskan pada desa pertanian dimana masyarakatnya hidup dari bertani dan beternak.

Lembaga Pendamping Usaha ini bertugas untuk membimbing masyarakat desa untuk membuat suatu usaha. Usaha yang dimaksud adalah suatu proses pengolahan produk primer menjadi suatu produk yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

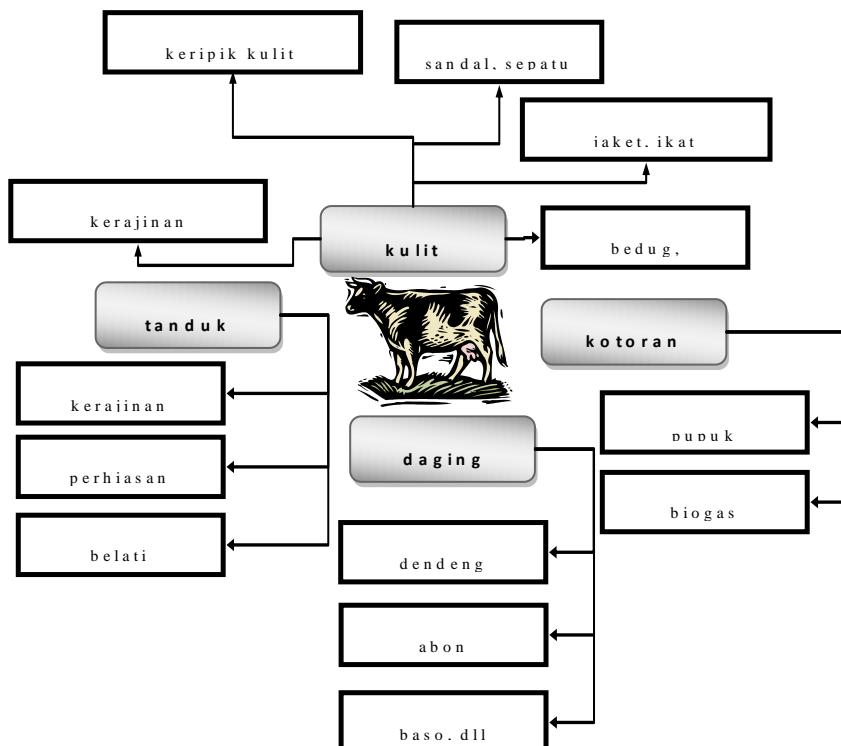
Tujuan dari lembaga ini adalah sebagai sarana peningkatan pendapatan bagi masyarakat desa; sebagai daya tarik bagi masyarakat desa yang telah pindah ke kota, untuk kembali lagi ke desa; mencegah urbanisasi berlebih; memeratakan pembangunan di desa; sebagai sarana pariwisata, dimana diketahui bahwa warga

negara asing memiliki ketertarikan pada budaya dan cara hidup masyarakat desa; dan lain-lain.

Melalui program lembaga pendamping usaha ini diharapkan masyarakat desa memiliki kemampuan untuk mewujudkan kemandirian usaha sehingga dapat berdikari, berwirausaha, dan berkembang secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pem berdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, memanfaatkan peluang, memecahkan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal) secara efektif dan efisien hingga tercapai kemandirian usaha.

Misal pada desa Bologarang dengan Bankpres-nya, LPU diharapkan mampu menjadi lembaga penyempurna dari program tersebut. Dari modal yang diperoleh yaitu sapi, LPU wajib memberi bimbingan dan pendampingan dalam mengolah produk berbahan dasar sapi.

Produk sapi yang bisa dikembangkan sebagai lapangan usaha bagi warga desa Bologarang adalah sebagai berikut:



G a m b a r 3. *Mind mapping produk-produk dari sapi.*

Berikut ini akan dipaparkan peran serta tugas dari masing-masing komponen pembentuk LPU.

#### *Perguruan Tinggi*

Di dalam LPU ini perguruan tinggi bertugas untuk mengajak pemerintah desa untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat desa yang mandiri. Perguruan tinggi memberi pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu perguruan tinggi juga wajib berperan sebagai pembimbing masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha. Hal ini bisa diwujudkan melalui mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN), program Sarjana Masuk Desa, dan dosen-dosen yang dikhususkan untuk mendampingi masyarakat desa dengan konsisten.

Dengan sifatnya yang intelek dan idealis, maka perguruan tinggi bertugas pula sebagai pengawas jalannya kegiatan penyaluran dana dari pihak perusahaan kepada masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana yang dialirkan. Sebagai pihak yang berpendidikan, perguruan tinggi wajib membantu memberikan solusi bagi masyarakat desa yang mengalami kesulitan dan hambatan.

Dalam hal pengembangan usaha, perguruan tinggi bertugas menginformasikan jenis-jenis produk yang layak produksi, menggali inovasi-inovasi atas produk baru yang akan meningkatkan nilai produk yang dihasilkan oleh masyarakat, mencari dan memberi teknologi alternatif \* yang dapat mempermudah masyarakat dalam berproduksi.

#### *Pemerintah Desa*

Pemerintah desa memiliki peran sebagai pemimpin masyarakat desa, sehingga pemerintah desa-lah yang akan lebih sering berkomunikasi dengan masyarakat. Pemerintah desa bertugas untuk menghimpun dan mengajak masyarakat untuk mengikuti program ini.

Antara pemerintah desa satu dengan pemerintah desa di daerah lain hendaknya menjalin hubungan baik sehingga terciptanya kerja sama. Kerja sama ini bermanfaat untuk membangun sinergi antar desa. Sinergi ini bisa berbentuk kemudahan pemasaran produk, pertukaran dan perkembangan informasi, serta pemacu persaingan sehat antar desa.

Dalam hal pengembangan usaha, pemerintah desa bertugas membangun infrastruktur untuk mempermudah mobilitas masyarakat, memberi apresiasi pada masyarakat agar masyarakat merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berproduksi lebih baik.

#### *Perusahaan*

Perusahaan berperan sebagai pendonor dana yang digunakan untuk modal dan dana pengembangan usaha masyarakat. Dana yang didonorkan adalah dana Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, agar tidak berkaitan dengan operasi keuangan perusahaan.

Dana ini sengaja diam bil dari dana CSR dengan tujuan agar perusahaan tidak menuntut adanya pengembalian modal investasi maupun meminta adanya pembagian laba. Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah meningkatkan nilai prestise perusahaan atas kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal pengembangan usaha, perusahaan swasta secara intensif memberi penyuluhan tentang manajerial dalam mengembangkan usaha, membantu masyarakat dalam memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dengan cara menampung dan menerima produk-produk yang dihasilkan masyarakat, selain itu perusahaan diharapkan membantu masyarakat dalam pemenuhan modal (seperti teknologi produksi) dari dana CSR.

## **Rencangan Kelanjutan dan Antisipasi Tantangan LPU**

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2010, menurut Ahmad Suudi, seorang organisatoris, warga Desa Brangkal, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur, penyebab utama terhentinya suatu lembaga ataupun program yang ditujukan untuk pengembangan masyarakat desa adalah ketidakjujuran dalam hal melaksanakan amanah maupun keuangan, adanya ketidakcocokan dalam memegang jabatan, dan kurangnya musyawarah sehingga menyebabkan kurangnya kesepakatan antar pengurus dan anggota dalam menjalankan program.

Solusi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah di atas adalah adanya musyawarah dalam berbagai hal untuk mencapai mufakat, kesamaan pandangan dalam memahami visi dan misi suatu program, konsistensi yang kuat antara pengurus dan masyarakat, serta saling menghormati dan menghargai antara pengurus dengan pengurus, pengurus dan masyarakat, serta antar anggota masyarakat.

Selain itu diperlukan adanya langkah-langkah antisipasi untuk kelanjutan program ini agar tetap berjalan, hingga masyarakat desa mampu membangun perekonomian desanya secara mandiri. Langkah-langkah antisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah desa satu dengan pemerintah desa yang lain;
- ✓ perlunya membangun integrasi vertikal antar aras masyarakat demi terciptanya pengembangan usaha yang lebih maju;
- ✓ adanya penghargaan kepada LPU yang berprestasi maupun yang berkinerja baik dari pemerintah pusat agar tercipta kompetisi yang membangun antar desa;
- ✓ perlunya peran aktif pemerintah desa sebagai pengayom masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat agar masyarakat terus termotivasi dalam mengembangkan usahanya, serta langkah-langkah antisipatif lainnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Gagasan yang diberikan adalah Lembaga Pendamping Usaha yang berjalan secara berkelanjutan. Lembaga ini bertugas untuk membimbing dan mendampingi masyarakat desa untuk berwirausaha. Lembaga Pendamping Usaha ini terdiri dari delegasi perguruan tinggi, pemerintah desa, serta perusahaan swasta. Dengan adanya lembaga akomodatif tersebut maka diperkirakan masyarakat desa

akan berkembang dengan usaha mereka dan akan menjadi desa yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

#### **S a r a n**

Dalam menciptakan pembangunan masyarakat secara merata diperlukan suatu metode atau pendekatan pembangunan yang menekankan adanya partisipasi, dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses pembangunan, dimana semua usaha swadaya masyarakat disinergikan dengan usaha-usaha pemerintah setempat dan *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan taraf hidup, dengan sebesar mungkin ketergantungan pada inisiatif penduduk sendiri, serta pelayanan teknis sehingga proses pembangunan berjalan efektif. Disamping itu kesadaran dan kemauan untuk bekerjasama mutlak dibutuhkan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, pihak swasta, serta masyarakat dalam pengembangan masyarakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian. 2006. Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Desa Mapan). Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.
- Faisal Kasryno. 1984. Kerangka Analisa Ekonomi Pembangunan Pedesaan. Prosiding. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Bogor, 1983. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 26-29.
- Griffin Ricky W, Ebert Ronald J. 2005. Bisnis/Edisi Ketujuh Jilid 1. Benjamin Molan, penerjemah. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. Terjemahan dari: *Business/ seventh edition*.
- <http://kamusbahasaindonesia.org/>
- <http://www.csrindonesia.com/>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan) [8 Maret 2010]
- <http://bps.go.id/>
- Ida Bagus Oka. 1991. Optimalkan Peran Desa Sebagai Sumber Daya Potensial Dalam Pembangunan Nasional Khususnya Ditinjau dari Aspek Pemerintahan Desa dan Masyarakatnya. Prosiding. Rumusan Hasil Seminar Nasional, Universitas Merdeka Malang, 6 dan 7 Agustus 1991. Malang, hlm. 1-7.
- Jusuf M Colter. 1984. Masalah Perkreditan Dalam Pembangunan Pertanian. Prosiding. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Bogor, 1983. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 302.
- Koentjaraningrat. 1984. Masyarakat Desa di Indonesia. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahmudi. 2008. Linkungan, Masyarakat, dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan – CSR. <http://fema.ipb.ac.id/index.php/lingkungan-masyarakat-dan-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-csr/> [8 Maret 2010]
- Nasdian, Ferdinand Tonny. 2006. Perkembangan Masyarakat (Community Development). Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Nasoetion, Andi Hakim. 2007. Pengantar ke Ilmu-ilmu Pertanian. Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa.
- Ravik Karsidi. Otonomi Daerah dan Peran Perguruan Tinggi\_(LPM UNS) <http://www.uns.ac.id/data/0017.pdf> [9 Maret 2010]
- Robbins Stephen P, Coulter Mary. 2002. Manajemen/Jilid 1. T Hermaya dan Harry Slamet, penerjemah. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. Terjemahan dari: *Management/ seventh edition*.
- Rustandi. 2010. Opini: Mengembalikan Peran Desa dalam Pembangunan. [http://www.budibach.com/home/index.php?option=com\\_content&view=article&id=119:opini-mengembalikan-peran-desa-dalam-pembangunan&catid=22:opini&Itemid=32](http://www.budibach.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=119:opini-mengembalikan-peran-desa-dalam-pembangunan&catid=22:opini&Itemid=32) [9 Maret 2010]
- Sastrosoenarto, Hartarto. 2006. Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan. Bima Grafika.

Todaro Michael P, Smith Stephen C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga/Edisi Kedelapan, Jilid 1. Haris Munandar, penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: *Economic Development/Eighth Edition*.

Wahyuew Muslim. 2009. Indonesia Mandiri dengan Optimisasi Peran Perguruan Tinggi. <http://farmasi07itb.wordpress.com/2009/05/05/indonesia-mandiri-dengan-optimisasi-peran-perguruan-tinggi/> [9 Maret 2010]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : F a r i d a A y u B r i l y a n t i  
K e l a h i r a n : N g a n j u k , 2 8 J u l i 1 9 8 9  
J e n i s K e l a m i n : P e r e m p u a n  
S t a t u s : B e l u m m e n i k a h  
A g a m a : I s l a m  
P e k e r j a a n : M a h a s i s w a  
D e p t./F a k./A n g k . : I l m u E k o n o m i / F E M / 2 0 0 8  
N I M : H 1 4 0 8 0 1 1 4  
N o . H P : 0 8 5 7 1 0 5 6 9 9 3 3  
A l a m a t : P a k u a n R e g e n c y , W a s t u k a n c a n a V I I , G 1 0 , N o . 1 7 ,  
D r a m a g a , K o t a B o g o r , J a w a B a r a t  
K e w a r g a n e g a r a a n : W N I  
G o l o n g a n D a r a h : A B  
M o t o H i d u p : M a j u i t u k e m u k a , b e r h e n t i d i j a l a n i n i w a l a u s e s a a t ,  
A n d a a k a n t e r g i l a s .

## Pengalaman Organisasi :

- Pramuka Siaga hingga Penggalang
  - Humas Tae Kwon Do SMA 14 Jakarta
  - Humas ROHIS SMA 14 Jakarta
  - IMM Universitas Muhammadiyah Jakarta (2007)
  - HMI Universitas Muhammadiyah Jakarta (2007)
  - Infokom Bengkel Karya Tulis TPB IPB (2008)
  - Duta Anti Korupsi IPB (2008 – sekarang)

K a r v a T u l i s :

- Karya Tulis Ilmiah Membangun Moral Generasi Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Karater – PKM - GT (2008)
  - Esai Amoeba Jagad Raya (2009)
  - Esai Metamorphose – Lulus seleksi Bengkel Karya Tulis TPB IPB (2008)
  - Esai Pemimpin Satu Paket – Juara I Jong Politicon (2008)
  - Esai Pertanian Islam Penangkal Todongan Pistol – Juara I Lomba Esai Sharia Economic Student Club (2008)
  - Esai Keluarga Penangkal Narkoba – Juara I Lomba Karya Tulis Let's Fight Against Drugs (2008)
  - Karya Tulis Ilmiah Tidak Ada Krisis Bagi yang Kreatif – Economic Icon IPB (2009)
  - Esai Semoga Hanya Gosip Jalanan – Juara I Lomba Esai Duta Anti Korupsi KPK (2009)

N a m a : D i a n F i t r i a n i  
K e l a h i r a n : 1 2 M a r e t 1 9 9 1  
J e n i s K e l a m i n : P e r e m p u a n

## Pengalaman Organisasi :

- Ketua Pramuka 2006-2007
  - anggota Bela Diri Tapak Suci 2005-2008
  - Bendahara Nasiyatul Aisyiah 2006-2007
  - ketua Divisi Pemberdayaan Wanita LSM PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Cab. Garut 2007-2008
  - Anggota KJP (Klub Jurnalistik Pelajar) Cab. Bandung 2006-2007
  - Bendahara HIPOTESA (Himpunan Profesi dan Peminat Ekonomi dan Studi Pembangunan) 2009-2010
  - Ketua Divisi Sosial Ekonomi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) 2009-2010

N a m a : N i s a ' u l H a q  
K e l a h i r a n : M a d i u n , 1 4 J a n u a r i 1 9 8 8  
J e n i s K e l a m i n : P e r e m p u a n  
S t a t u s : B e l u m m e n i k a h  
A g a m a : I s l a m  
P e k e r j a a n : M a h a s i s w a  
D e p t./F a k./A n g k . : I l m u E k o n o m i / F E M / 2 0 0 8  
N I M : H 1 4 0 8 0 1 1 6  
N o . H P : 0 8 1 2 1 3 9 9 9 3 0 7  
A l a m a t : J l . H o r t i k u l t u r a N o . 8 B , R T / R W 0 8 / 0 0 6 ,  
K o m p l e k P e r t a n i a n , J a t i P a d a n g ,  
P a s a r M i n g g u , J a k a r t a S e l a t a n 1 2 5 4 0  
K e w a r g a n e g a r a a n : W N I  
G o l o n g a n D a r a h : O  
M o t o H i d u p : S e l a l u m e l a k u k a n y a n g t e r b a i k

## Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris OSIS SMA periode 2006-2007
  - Ketua FORPISA periode 2006-2007
  - Sekretaris Departemen Advokasi BEM FEM IPB 2010

K a r y a T u l i s :

- #### • Pengolahan Sampah Menjadi Pupuk Kompos